



The Islamic Intellectual Intelligence as a Social Class

Budi Afriandi^{*1}, Thaheransyah², Tamrin Kamal³, Saifullah SA⁴, Desi Asmaret⁵, Julhadi⁶

*** budiapriandi60@gmail.com**

^{1,2,3,4,5,6} Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

ABSTRACT

Islamic intelligence in Indonesia has experienced ups and downs, both politically and intellectually. The transformation of Indonesian Islamic Information Services, which were initially marginalized by intellectuals, politics, and bureaucracy in Indonesia, to a central position is one example of the long journey of Islamic Information Services in Indonesia. The emergence of Indonesian intellectuals at the end of the 19th century and the first two decades of the 20th century manifested in several names that continued to evolve, from the birth of figures to the emergence of Bangsawan Oesoel and Kaoem Muda. Kaoem, educated youth, or John. The emergence of the Secret Service was influenced by the ethical revolution in the Dutch East Indies due to the liberal economic crisis in the Dutch East Indies. Additionally, this period was marked by the entry of modernist Islamic reformism, which sought to balance the Western secularism trend. The 20th century witnessed various struggles for recognition and political authority. From the late 20th century to the early 21st century, many changes occurred in the economic and political systems, with successive government changes. This period was also marked by an economic crisis, signaling the beginning of the second economic era after the ethical reforms in the Dutch East Indies. Therefore, it can be said that active participation and power struggles took place among Indonesian Islamic intellectuals. Thus, the formation of Indonesia's political and bureaucratic elite cannot always be separated from the development and changes in the map of Indonesia's Islamic intelligence institutions. In fact, they have been at the core of Indonesia's political elite, from the implementation of Dutch ethical policies to the post-reform regimes.

Keywords: Social Class 1; Islamic Intelligence 2; Islamic Modernism 3; Social Transformation 4

PENDAHULUAN

Dalam pembahasan ini digunakan istilah “kecerdasan Islam” berdasarkan sejarah yang menjelaskan bahwa Chokolaminot, Agus Salim, dan Suryopranoto disebut sebagai generasi kecerdasan Islam pertama di Indonesia (Latif, 2000:32). Pasalnya pada periode tersebut terdapat tiga arus yang mempengaruhi lembaga pendidikan dan menjadi jalur masuk Islam di Indonesia: Mekkah, pendidikan Barat, dan Kairo (Latif, 2000:655-667). Jika ditelusuri lebih dalam, Chokroaminoto sendiri merupakan produk pendidikan Barat yaitu OSVIA, pendidikan sekuler model Belanda. Meski demikian, sebagai produk pendidikan Barat, ia berupaya mempertahankan identitas keislamannya.

Van Niel menggambarkan Chokroaminoto sebagai cabang kedua dari kepemimpinan Salikat Islam (SI), sekelompok intelektual berpendidikan Barat yang tidak puas dengan tetap berada dalam lingkungan struktural era kolonial (Van Neil: 2009:45). Hal ini menjadikannya seorang intelektual Islam (Latif: 2000:44). Hal ini mendorong munculnya kelompok intelektual hibrid yang kemudian melahirkan “intelektual Ulemain” (intelektual modern yang berilmu agama) (Latif, 2000:107).

Hal inilah yang membedakan tipikal landasan pemikiran Chokroaminoto dengan landasan pemikiran orang-orang sezamannya. Berbeda dengan mazhab Mekkah yang muncul pada kelompok Islam tradisional jebolan pesantren, seperti KH Wahab Chasbullah. Berbeda pula dengan Mazhab Kairo yang muncul pada kelompok reformasi Islam seperti KH Ahmad Dahlan. Hal ini terutama terjadi pada kelompok pendidikan Barat seperti Sutomo, Tan Maraka, Ciputo Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, yang telah kehilangan jati diri keislamannya.

Padahal, jika menilik ilmu para ulama terpelajar di Timur Dekat (Kairo) dan Mekkah yang ditelusuri Bruysen, karya para ulama terpelajar di Arab dan Timur Tengah berkisar pada kajian permasalahan tata bahasa Arab (Timur Dekat), Fiqh dan Ushr al-Fiqh, juga Iman atau Ushruddin dan ajaran akhlak (Bruinessen: 1994: 145-169). Namun, seperti yang dialami Chokroaminoto dan Salim, situasi sosial di Indonesia lebih kompleks dibandingkan di Timur Tengah.

Karena Chokroaminoto dan Salim menguasai bahasa Inggris dan Belanda, mereka peka terhadap kajian yang tidak dipelajari di Timur Tengah, seperti filsafat, politik, dan sosiologi. Di sini kita dapat melihat keunikan pemikiran politik Chokroaminoto. Pengetahuannya yang mendalam tentang konsep-konsep Barat tentang sosialisme, nasionalisme, dan demokrasi membentuk cakrawala pemikirannya yang kompleks.

Meski berasal dari aliran Puriyai yang tidak banyak mengenal Islam, Chokroaminoto terus menginternalisasikan dirinya sebagai seorang Muslim, tidak pernah berubah melalui proses pembelajaran yang tiada henti. Proses ini menunjukkan bahwa pemikiran dan perjuangan Chokroaminoto sangat dipengaruhi oleh dinamika pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia, yang menggabungkan antara tradisi Islam yang kuat dengan pengaruh pemikiran Barat yang modern.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun Chokroaminoto berupaya mempertahankan identitas keislamannya, ia juga menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan dan mengadaptasi diri dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu. Hal ini menjadi bagian dari proses intelektualisasi Islam di Indonesia, di mana berbagai elemen Islam tradisional dan modern berinteraksi untuk membentuk pemikiran yang relevan dengan kondisi zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis historis dan sosiologis untuk mengeksplorasi transformasi inteligensia Islam sebagai sebuah kelas sosial baru dalam konteks sejarah, sosial, dan politik Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan dinamis, khususnya terkait dengan perjalanan intelektual dan politik inteligensia Islam dari masa kolonial hingga era reformasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis kritis terhadap berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen arsip sejarah, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci, seperti akademisi, cendekiawan Islam, dan ahli sejarah, untuk menggali perspektif mereka terkait peran dan kontribusi inteligensia Islam dalam berbagai

bidang kehidupan, termasuk pendidikan, politik, dan agama. Dalam pengumpulan data, perhatian khusus diberikan pada dokumen-dokumen historis yang mendokumentasikan perkembangan inteligensia Islam, mulai dari masa pergerakan nasional, pembentukan organisasi seperti Sarekat Islam dan HMI, hingga peran mereka dalam pemerintahan pada era reformasi.

Data yang terkumpul dianalisis secara naratif untuk membangun kerangka historis mengenai perjalanan inteligensia Islam, serta secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama seperti interaksi antara pendidikan Barat dan tradisi Islam, dinamika ideologi politik, dan peran sosial inteligensia Islam dalam masyarakat Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif yang mengutamakan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, serta menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai sumber informasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian tentang inteligensia Islam, khususnya dalam memahami transformasi mereka dari kelompok yang semula termarginalkan menjadi kelas sosial yang berpengaruh di pusat kekuasaan politik dan birokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana inteligensia Islam berkontribusi dalam membentuk wajah pendidikan modern, pergerakan politik Islam, serta dinamika sosial di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi dalam melihat peran inteligensia Islam sebagai aktor penting dalam sejarah dan transformasi sosial-politik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pidato bersejarahnya yang bertajuk "Tanggung Jawab Moral Akal" yang disampaikan kepada sivitas akademika Universitas Indonesia pada tanggal 11 Juni 1957, Mohammad Hatta mengartikan "akal" sebagai sinonim dari "intelektual". Sero Smarjan pernah menulis "Perubahan Peran Intelektual dalam Pembangunan Nasional Indonesia" (1981), yang di dalamnya ia menjelaskan peran "intelektual". Dia berpendapat bahwa: konsep dianggap atau menganggap diri sebagai intelektual harus dimaknai sinonim dengan kata 'intelektual' (Soemardjan, 1981: 139-140). Sementara itu, Arif Budiman (1981) menggunakan istilah "intelektual" dan "intelektual" secara bergantian, dengan menggunakan kerangka literatur Barat tentang "intelektual" dalam bukunya, "Mahasiswa Sebagai Intelektual: Pengalaman Indonesia". Ia pernah menggambarkan mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari "kelompok intelektual". Pada kesempatan lain, Daniel menggambarkan murid-muridnya sebagai orang-orang yang cerdas. Daniel Dhakidae (2003) menerbitkan buku tentang intelektual Indonesia pada masa Orde Baru dengan judul *Intelektual dan Kekuasaan di Negara Orde Baru*.

Namun, dalam buku ini ia tidak membedakan secara jelas antara konsep "intelekt" dan "kecerdasan". Selain mengaitkan istilah "intelektual" dengan "kaum intelektual," ia memberikan contoh "intelektual" Rusia sebagai contoh keberadaan "kaum intelektual." Ambiguitas seperti ini tidak hanya terlihat dalam studi-studi di Indonesia, namun juga tersebar luas dalam wacana akademis Barat. Menurut Alexander Guerra (1976), sejak lama para sosiolog Barat melihat "tidak ada perbedaan antara intelektual Barat dan formasi sosial unik yang disebut kaum intelektual yang mulai berkembang di Rusia dan Polandia." periode ini. "Pertengahan abad ke-20. Guerra bahkan menyatakan bahwa baik *Encyclopedia of the Social Sciences* maupun *International Encyclopedia of the Social Sciences* tidak mencantumkan istilah "intelijen". Lebih lanjut Gera menegaskan, karya Robert Michels (1932) dan Edward Sills (1968) tidak menganggap kedua istilah tersebut sebagai dua konsep yang berbeda.

Pada tahun-tahun terakhir rezim Suharto, berbagai tokoh dari kalangan intelektual

Islam secara mengejutkan memainkan peran penting dalam wacana sosiopolitik di Indonesia, menyusul proses demoralisasi yang melanda para politisi Islam sejak tahun 1960an. Pada waktu yang hampir bersamaan, banyak intelektual Islam lainnya mulai menduduki eselon atas birokrasi pemerintah. Sejak berdirinya Ikatan Ulama Islam Indonesia (ICMI) pada bulan Desember 1990, kiprah para intelektual Islam semakin banyak diberitakan di media. Belakangan, dengan bangkitnya gerakan reformasi pada tahun 1997 dan 1998, beberapa anggota intelektual Islam berperan penting dalam proses lengsernya Soeharto. Kepentingan politik intelektual Islam ini menjadi semakin nyata pada masa pemerintahan Habibie (interim), ketika sebagian besar menteri dan pejabat senior berasal dari anggota ICMI. Pada saat yang sama, kepemimpinan Partai Golkar (penerus mesin politik Orde Baru) mulai didominasi oleh mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Keberhasilan politik kaum intelektual Islam berpuncak pada terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden setelah Habibie, dan selanjutnya, tokoh-tokoh Muslim diangkat menduduki jabatan-jabatan nasional senior. Sementara kaum intelektual Islam berhasil memperoleh kredibilitas intelektual yang lebih besar pada akhir abad kedua puluh, selain memperoleh status politik dan birokrasi, partai-partai Islam secara keseluruhan tidak pernah menikmati dukungan mayoritas. Pada pemilu legislatif 1998, seluruh partai Islam, termasuk partai berbasis Pancasila, hanya memperoleh 36,38% suara atau hanya memperoleh 37,46% kursi DPR (ini berarti tidak memperoleh 173 kursi). Jumlahnya 462 kursi). Selain itu, ketika kaum intelektual Islam memperoleh status politik dan birokrasi, sebagian besar pemimpin senior Islam menjadi kurang terikat pada pretensi Islam. Seperti halnya setelah kemerdekaan, kelompok-kelompok Islam tidak lagi terikat pada agenda memasukkan kembali “Piagam Jakarta” ke dalam konstitusi. Citra intelektual Islam di akhir abad ke-20 ini bertolak belakang dengan gambaran awal abad ke-20. Hanya sedikit intelektual terpelajar di Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), namun sebagian besar berpartisipasi dalam organisasi yang berhubungan dengan Priyayi seperti Budi Utomo. Hal ini karena mereka suka melakukan sesuatu. Namun keberhasilannya dalam melindungi dan merebut hati serta pikiran masyarakat terjajah di tingkat akar rumput membuat SI muncul sebagai perkumpulan pertama di Hindia Belanda, yang keanggotaannya tersebar luas hingga melampaui batas kepulauan Indonesia mampu mencatat jumlah anggota terbanyak. Sementara itu, pada akhir abad ke-20, banyak lapisan masyarakat Indonesia yang paling terpelajar bergabung dengan organisasi mahasiswa dan intelektual Islam (HMI, ICMI, KAMMI, dll) dan partai politik Islam. Namun, daya tarik Islam dalam politik cenderung menurun di masyarakat akar rumput.

Meskipun pengaruh intelektual Islam semakin besar dan sikap politik yang semakin inklusif di kalangan umat Islam, partai politik Islam dan identitas komunal tetap bertahan. Masih bertahannya politik identitas Islam terlihat dari upaya sebagian intelektual Islam, khususnya generasi muda, dalam memperjuangkan penegakan hukum Islam (Syariah). Pada saat yang sama, istilah “Islam” masih sering digunakan untuk menggambarkan organisasi intelektual dan politik. Sejalan dengan munculnya partai-partai Islam liberal dan non-liberal, perebutan ideologi dan identitas politik juga terjadi di antara dan di dalam tradisi intelektual yang ada, dengan tujuan yang berbeda-beda, dan pada tingkat yang berbeda-beda, intensitas dan ekspresi terus terjadi. Di sini, politik Islam mengalami perpecahan internal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana dibuktikan oleh kesuburan partai-partai Islam. Seiring berjalannya era reformasi, bahkan kaum intelektual Islam yang pernah bersatu dalam ICMI terpecah menjadi berbagai faksi. Semua gambaran tersebut mencerminkan kesinambungan dan perubahan perkembangan intelektual Islam.

Adanya gambaran diakronis dan sinkronis intelijen Islam patut mendapat perhatian

serius dari para pakar intelijen Indonesia. Karena satu atau beberapa alasan, tingginya tingkat partisipasi politik dan keterlibatan kaum intelektual Indonesia dalam perebutan kekuasaan masih menjadi ciri utama politik Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami kesinambungan dan perubahan pembentukan elite Indonesia dan politiknya, penting untuk memahami kesinambungan dan perubahan perkembangan badan intelijen Indonesia. Terlebih lagi, pergeseran posisi intelektual Islam dari posisi periferal ke posisi sentral dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia nampaknya membingungkan jika dicoba dipahami dalam konteks penelitian yang ada mengenai elit Indonesia kontemporer dan politiknya. Dalam karyanya yang berpengaruh, *Agama Jawa* (1960, 1976), Geertz menulis bahwa unsur bangsawan dan birokrasi (priyayi) masyarakat Jawa mewakili kelompok dengan pandangan dunia pra-Islam.

Pendidikan sosial belum pernah menjadi landasan utama integrasi sosial di Indonesia. Kebanyakan intelektual bersatu berdasarkan solidaritas budaya, bukan berdasarkan kelas. Dalam kondisi yang diskriminatif dan segregasi seperti itu, upaya untuk menciptakan elit yang modern dan terpelajar dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sekuler menjadi bertentangan karena para intelektual kembali ke akar identitasnya. Hal ini dapat menimbulkan tren. Ketika kelas intelektual Indonesia mulai merumuskan tanggapan ideologis terhadap negara kolonial yang menindas, keragaman latar belakang sosiokultural mereka menyebabkan perbedaan ideologi. Akibatnya, kelas intelektual Indonesia terpecah menjadi berbagai tradisi politik dan intelektual. Dengan demikian lahirlah intelektual Islam, intelektual komunis, intelektual nasionalis, intelektual sosialis, intelektual Kristen, dan lain-lain. Dalam konflik antara tradisi intelektual ini, masing-masing kelompok berupaya mendapatkan pendukung melalui afiliasi dengan kelompok status yang mapan (misalnya kelompok solidaritas budaya). Namun, mereka masih memiliki kesamaan dalam hal hak istimewa sosial, bahasa, adat istiadat, latar belakang pendidikan dan orientasi kerja.

Dengan kata lain, kaum intelektual Indonesia mencerminkan ekspresi kolektif dalam kerangka “identitas bersama dalam keberagaman” dan “keberagaman dalam identitas bersama”. Karena kaum intelektual Indonesia merupakan bagian dari dinamika sejarah Indonesia, maka perkembangan sosialnya pun tunduk pada proses dan perubahan sejarah. Istilah Indonesia (Melayu) pertama yang menggambarkan lahirnya kaum intelektual di Hindia Belanda adalah “aristokrasi pikiran”, yang muncul dalam kehidupan publik pada dekade pertama abad kedua puluh. Pada tahun 1960-an, istilah “intelektual” (ejaan lama: “jendekiawan”) mulai mempunyai konotasi politik, sinonim dengan istilah “intelektual” atau “intelektual”. Hal ini terlihat dengan berdirinya Organisasi Gendekiawan Indonesia (OTI) pada awal tahun 1965, sebuah organisasi intelektual sayap kiri. Tak lama kemudian, majalah militan Gendekiawan, milik Persatuan Kegiatan Cendekiawan Indonesia (KASI) Berjuan cabang Bandung, diterbitkan pada tahun 1966. Pada tahun 1970-an, istilah ini sering digunakan dalam diskusi publik di Indonesia ketika politik Orde Baru menggantikan terminologi Barat dengan bahasa Indonesia.

Dalam kaitan ini, kelompok orang-orang yang berpendidikan Islam di berbagai klub, organisasi budaya dan politik lebih baik dipahami bukan sebagai kelompok “intelektual”, tetapi mungkin sebagai kelompok “intelektual”. Namun, penting untuk dicatat bahwa tanpa intelektual tidak ada komunitas. Teori ini membagi Islam menjadi dua bagian. Yang satu adalah Islam yang bersifat religius dan yang lainnya adalah Islam yang bersifat politis. Pemerintah kolonial harus menghormati aspek pertama dari dunia Islam, namun mereka tidak bisa mentolerir aspek kedua.

Hasil sintesis ini adalah campuran antara “reformisme Islam dan modernisme”. Gerakan intelektual baru ini terinspirasi oleh ajaran pemikir Islam terkemuka Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897), yang perhatian utamanya adalah kelumpuhan permanen Islam. Islam.

Dalam pandangan al-Afghan, keyakinan dan praktik Islam harus direformasi untuk membebaskan masyarakat Islam dari kekuasaan kolonial, karena baginya agama terkait dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kesatuan politik dan kekuasaan dasar dari Al-Afghani percaya bahwa Islam pada dasarnya dapat menjadi landasan masyarakat ilmiah modern, sebagaimana ia menjadi landasan kejayaan Islam abad pertengahan. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muhammad Abdu (1849-1905). Karya utamanya, *Al-Urwa al-Wuthqâ* (The Solid Band), menjadi dasar propaganda gerakan pan-Islamis. Sejak itu, gerakan pan-Islamis menjadi perwujudan solidaritas Islam yang pernah diimpikan al-Afghan. Di mata al-Afghanistan, pan-Islamisme dan nasionalisme dapat saling melengkapi dari perspektif “pembebasan”.

Ahmad Khatib, ulama besar terakhir kolonial Jawa pada pergantian abad ke-19 dan ke-20, merasa skeptis terhadap meluasnya pengaruh modernisme reformis Islam yang diilhami oleh gagasan Abduh. Meskipun ia sendiri dipengaruhi oleh reformisme Islam, ia mengkritik gagasan Abduh tentang ijtihad dan modernisme dalam kapasitasnya sebagai penjaga tradisi doktrin Syafii. Dengan cara ini, Khatib berperan sebagai jembatan antara tradisi dan inovasi. Dalam posisi “tengah” ini, Khatib berperan sebagai bidan bagi lahirnya generasi penerus ulama dan intelektual reformis-modernis seperti Mohd. Tahir bin Jalaluddin, Pak Jamil Jambek, Pak Abdullah Ahmad, Pak Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), Pak Taib Umar, Pak Ahmad Daklan, Pak Agus Salim, dan Syekh Sulaiman ulama tradisional konservatif seperti Al-Rasuli dan Hasyim Asy’ari.

Komposisi aliran Islam secara keseluruhan di Majelis Konstituante menunjukkan hasil serupa. Pada tanggal 8 Maret 1956, Presiden Sukarno mengangkat pemimpin PNI Ali Sastroamijoyo sebagai pendirinya karena Partai Rakyat Islam (PNI) memperoleh perolehan suara terbanyak (22,3%) dengan perolehan 98 suara. Dalam kabinet Ali II, semua partai besar Islam mempunyai perwakilan di kabinet. Namun, kabinet ini gagal karena perselisihan ideologis dan pribadi yang sengit di dalam kabinet, serta konflik di dalam militer, yang berujung pada kerusuhan lokal. Perdebatan sengit pun segera terjadi di DPR dan Konstituante mengenai posisi Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Bagi kubu non-Islam, Piagam Jakarta hanyalah salah satu dokumen sejarah yang muncul dari perjalanan bersejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Oleh karena itu, Piagam Jakarta tidak dapat dan tidak boleh menjadi sumber hukum. Di sisi lain, bagi kubu Islam, Piagam Jakarta tetap mempunyai makna hukum dan dapat dijadikan sumber informasi, sebab ia tidak saja mempengaruhi pembukaan UUD 1945 tetapi juga seluruh teks UUD 1945. Penerapan hukum Islam bagi umat Islam. Ketika perdebatan terus berlanjut mengenai status Piagam Jakarta, Sukarno akhirnya mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengatur pengembalian ke Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante. Pembukaan ketetapan tersebut menyatakan bahwa “Piagam Jakarta merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945”

Dengan semakin banyaknya pelajar muslim di bangku SMP dan SMA, maka kepentingan khusus masyarakat terpelajar tidak lagi dapat dipenuhi oleh organisasi kepemudaan yang ada. Sebab, kelompok terakhir ini juga terdiri dari generasi muda dengan tingkat pendidikan rendah. Untuk memenuhi minat khusus pelajar, maka didirikanlah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada awal tahun 1947, dan Mahasiswa Islam Indonesia (PII) didirikan pada akhir tahun 1947 untuk siswa sekolah menengah atas. Kemunculan organisasi ini awalnya ditolak oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII dengan alasan dapat mengganggu persatuan pemuda Islam (Sitompul, 2002:2). Namun dalam perkembangannya, ketiga organisasi tersebut mampu hidup berdampingan. Pada Konferensi Al-Islam di Solo (20-25 Oktober 1945), para pemimpin Islam dari berbagai aliran mengakui GPII, HMI, dan PII

sebagai satu-satunya badan sah pemuda muslim, pelajar muslim, dan pelajar muslim (Sitomple, 1976, 39). Perdebatan internal (Islam) dan bertambahnya jumlah santri dan santri yang berkembang menyebabkan maraknya tumbuhnya berbagai organisasi santri dan mahasiswa Islam. Untuk menggambarkan perkembangan organisasi pesantren dan mahasiswa Islam ini sebagai inti kepemimpinan masa depan komunitas politik Islam, kami akan fokus pada empat organisasi terpenting: HMI, PII, PMII, dan IMM.

Selain Persatuan Perguruan Tinggi dan Mahasiswa, juga diperkenalkan Persatuan Ulama Islam atau Persami yang pertama, yang menerima mantan anggota Persatuan Mahasiswa Islam dan Mahasiswa. Asal usul HMI dimulai pada tanggal 5 Februari 1947, ketika didirikan oleh mahasiswa STI atas prakarsa Laflan Pehn (lahir 1922). Rahlan Pane merupakan adik dari dua tokoh sastra Indonesia terkemuka, Sanusi Pane dan Armin Pane. Meskipun Pak Paneh memiliki latar belakang Islam yang kuat, ia juga tergabung dalam berbagai organisasi. Sebelum bergabung dengan STI, latar belakang pendidikan utama Payne adalah Pondok Pesantren, HIS, MULO, dan AMS Muhammadiyah. Payne juga bersekolah di sekolah dasar nasionalis seperti Taman Antara di Sipolok dan Taman Siswa di Medan. Setelah meninggalkan AMS Muhammadiyah di Jakarta, ia bersekolah di sekolah nasionalis Taman Dewasa Raya. Sesaat sebelum pendudukan Jepang, Payne bergabung dengan organisasi sayap kiri Gerindo, di mana ia berkolaborasi dengan calon pemimpin komunis D.N. Saya telah menghubungi Anda. bantu. Pada masa pendudukan Jepang, Paine berpartisipasi dalam gerakan bawah tanah Grup Angkatan Laut. Semasa kuliah di STI/UII Yogyakarta. Melalui pertemuan dengan guru-guru STI seperti Abdul Kahal Muzakir, M. Rasjidi, Fathulrahman Kahrawi, Kasman Singodimejo, dan Prawot Mankusasmit, Pinus terinspirasi untuk menghidupkan kembali jati diri keislaman dan ketaqwaan yang diterimanya (Sitompul, 2002: 45-47).

Transformasi batin ini memberinya dorongan psikologis untuk membangun jaringan baru intelektual muda Islam. Pane terinspirasi oleh semangat para intelektual Islam generasi tua di masa lalu untuk mendirikan organisasi mahasiswa Islam seperti JIB dan SIS yang akan menjadi inti pemimpin Islam masa depan. Alasan lainnya adalah organisasi mahasiswa lokal yang ada seperti Persatuan Mahasiswa Yogyakarta (PMY, didirikan pada tahun 1946) dan Persatuan Pelajar Indonesia Solo (SMI, didirikan pada tahun 1946) tidak memenuhi keinginan mahasiswa Muslim. Bersaing dengan organisasi mahasiswa sekuler untuk menarik keanggotaan, HMI meniru JIB dan SIS sebagai bagian dari Islamisasi intelektual melalui modernisasi lembaga Islam. Namun, berbeda dengan generasi Islam sebelumnya, generasi Pane merupakan generasi intelektual ketiga, juga lahir dari revolusi merdeka, dan cenderung lebih “nasionalis” dan inklusif dalam orientasi politiknya.

Tahap awal perkembangan pesat ini sebenarnya dimulai pada awal tahun 1950-an, ketika beberapa anggota UI (ITB) Cabang Bandung, seperti M. Imaduddin Abdul Rahim (lahir 1931) dan Ismail Hasan Metareum (lahir 1929), Mahasiswa dari sebuah sumur -Universitas sekuler terkenal berpartisipasi. dan Bintoro Chokroamijojo (lahir 1931) dari UI cabang Jakarta bergabung dengan HMI. Pada akhir tahun 1950-an, anggota baru HMI yang terkenal adalah Sulastomo (lahir tahun 1938) dari UI dan Endang Saifuddin Anshari (lahir tahun 1938) dari Universitas Padjadjaran. Menanggapi pertumbuhan keanggotaannya, HMI memulai pelatihan eksekutif sistematis pada tahun 1959. Karena kurangnya literatur tentang ideologi Islam di Indonesia, program pelatihan eksekutif menggunakan buku Islam dan Sosialisme karya Chokroaminoto tahun 1920-an sebagai referensi utama. Pada awal tahun 1960-an, sejumlah besar mahasiswa berlatar belakang Santoli berbondong-bondong masuk universitas. Diantaranya adalah tokoh-tokoh HMI ternama seperti Nurchorish Majid dari IAIN Jakarta (lahir 1939). Johan Effendi (1939) IAIN Lahir di Yogyakarta.

M. Dawam Rahardjo dari UGM (lahir 1942), Ahmad Wahib (lahir 1942), dan M. Amien

Rais (lahir 1944). Fahmi Idris (lahir 1940) dan Ridwan Saidi (lahir 1942) dari UI. Adi Sasono (lahir 1943) dari ITB. Ahmad M. Saefuddin (lahir 1940) dari IPB. Ketika demokrasi terpimpin mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1960an, HMI telah menjadi organisasi mahasiswa terbesar di tanah air. Jumlah anggotanya dikatakan telah melebihi 100.000 pada akhir tahun 1960an. Satu tahun setelah berdirinya IPNU, terbentuklah Ikatan Mahasiswa Wanita NU (IPWNU). Kedua organisasi baru ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara pelajar NU dengan santri dari sekolah modern dan pesantren sebagai sumber pendidikan bagi intelektual tradisional (Wahid, 2000:30-31). Ketika jumlah kaum tradisional meningkat pada akhir tahun 1950-an, upaya dilakukan untuk mendirikan organisasi mahasiswa terpisah untuk kaum tradisional. Pada bulan Desember 1955, kaum tradisional Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Walikota Haris Sugyanto mendirikan Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU). Pada tahun yang sama, kaum tradisional Surakarta yang dipimpin oleh Mustahar Ahmad dari Universitas Chokroaminot (didirikan pada tahun 1955) mendirikan Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), yang mirip dengan nama organisasi mahasiswa NU yang sudah ada di Timur Tengah Ta.

Namun, para pemimpin IPNU menganggap eksperimen pertama ini terlalu dini, karena jumlah kelompok tradisional masih terbatas dan keberadaan organisasi-organisasi tersebut masih tersebar secara lokal (Wahid, 2000:33-34). Jumlah mahasiswa tradisional meningkat pesat pada akhir tahun 1950-an, terutama setelah berdirinya universitas agama. Selain IAIN, NU mendirikan universitas Islam sendiri pada tahun 1958, Universitas Nadlatul Ulama Solo, yang hanya memiliki satu fakultas: Syariah. Dari segi rasionalisme, teknologi, dan keterbukaan terhadap pendidikan modern, mahasiswa NU sama modernnya dengan mahasiswa Muhammadiyah, sehingga NU sudah mempunyai inteligensia tersendiri saat itu. Namun kaum intelektual NU berbeda dengan kaum intelektual Muhammadiyah dalam hal orientasi teologisnya. Para intelektual Muhammadiyah diminta untuk mereformasi ajarannya dengan cita-cita pemurnian agama, namun para intelektual NU tetap konservatif dalam pandangannya. Kata "konservatif".

Oleh karena itu, para intelektual di universitas-universitas tersebut lebih tepat disebut intelektual "modernis konservatif" daripada intelektual "tradisional". Meningkatnya jumlah mahasiswa tradisional dan menguatnya hubungan antara HMI dan Masumi menimbulkan konflik yang intens dalam politik mahasiswa. Hal ini memotivasi para pimpinan IPNU untuk membentuk organisasi khusus mahasiswa tradisional. Pada Musyawarah Nasional IPNU yang diadakan di Kaliuran (Yogyakarta) pada tanggal 14-16 Maret 1960, diangkat 13 orang anggota IPNU untuk mendirikan organisasi yang diinginkan. Hal ini akhirnya mengarah pada terbentuknya Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tanggal 17 April 1960, dengan Mahboub Junadi (lahir 1933) sebagai presiden pertamanya, Charid Mawardi (lahir 1936) sebagai wakil presidennya, dan Said Budeiry sebagai sekretaris jenderal. Pada akhir tahun 1960-an anggotanya hanya beberapa ribu. Kemunculan PMII menimbulkan skeptisisme dan sinisme baik di kalangan ulama konservatif maupun HMI. Ulama konservatif NU sangat prihatin dengan pelanggaran syariah karena tidak adanya pemisahan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan PMII.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inteligensia Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari kelompok yang termarjinalkan menjadi kelas sosial baru yang berperan penting dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, dan sosial. Perjalanan panjang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, seperti interaksi dengan pendidikan Barat, tradisi Islam lokal, dan modernisme. Inteligensia Islam memainkan peran

strategis sebagai penghubung antara identitas keislaman dengan dinamika modernitas, yang terlihat dalam kontribusi mereka pada pembentukan organisasi keagamaan, partai politik, serta birokrasi negara. Kemunculan inteligensia Islam di Indonesia, dimulai pada akhir abad ke-19, tidak hanya menjadi respons terhadap kolonialisme tetapi juga hasil dari sintesis pemikiran tradisional Islam dengan gagasan modernisme yang diadopsi dari Timur Tengah dan Barat. Kelompok ini berperan penting dalam membangun gerakan intelektual, sosial, dan politik yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Muslim Indonesia. Meski demikian, inteligensia Islam tidak luput dari tantangan, termasuk fragmentasi ideologi dan persaingan internal dalam mewujudkan visi dan agenda politiknya. Pada era reformasi, inteligensia Islam berhasil menempatkan diri sebagai aktor sentral dalam dinamika politik Indonesia. Namun, meskipun pengaruh mereka meningkat, daya tarik politik berbasis Islam di tingkat akar rumput cenderung menurun. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi di mana inteligensia Islam lebih menekankan inklusivitas politik dan identitas nasional dibandingkan dengan sekadar mengusung agenda keislaman semata. Peran inteligensia Islam ini menunjukkan kesinambungan sekaligus perubahan dalam formasi sosial dan politik Indonesia, menjadikan mereka sebagai kelas sosial yang dinamis dan relevan hingga saat ini. Kesimpulan ini menegaskan bahwa inteligensia Islam tidak hanya berfungsi sebagai agen perubahan dalam sejarah sosial-politik Indonesia, tetapi juga sebagai simbol sintesis antara tradisi keislaman dan modernitas. Dengan memahami transformasi dan kontribusi mereka, penelitian ini memberikan wawasan penting untuk melihat bagaimana kelas sosial ini terus beradaptasi dan berperan dalam menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Budiman. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bruinessen, Martin van dan Julia Day Howell (ed). *Urban Sufism*. Jakarta: Mizan, 1994.
- Clifford, Geertz. *The Religion of Java*. USA: Chicago, 1955.
- Daniel, Dhakidae. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Harry Jundrich, Benda. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague: TP, 1958.
- Martin Van, Bruinessen. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Robert, van Neil. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustidaka Jaya, 2009.
- Selo, Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 1981.
- Solichin. *HMI Candardimuka Mahasiswa*. Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2010.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Yudi, Latif. *Inteligensia Islam dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Islam Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.
- _____, *Genealogi Inteligensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia abad XX*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Vedi R. Hadiz dan Daniel, Dhakidae, eds. *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinox dan ISEAS, 2005
- Bruinessen, Martin van, dan Howell, Julia Day (Eds.). *Urban Sufism: Transnational Dynamics in Islamic Mysticism*. Jakarta: Mizan, 2014.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Hadiz, Vedi R., dan Dhakidae, Daniel (Eds.). *Social Science and Power in Indonesia*. Edisi Baru. Singapore: Equinox Publishing, 2015.
- Latif, Yudi. *Genealogi Inteligencia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligencia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Solichin. *HMI: Candardimuka Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2015.
- Wahid, Abdul. *Islam dan Dinamika Sosial-Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2020.
- Zainuddin, Fathurrahman. *Pemikiran Islam Modern dan Transformasi Sosial*. Bandung: Mizan, 2019.